

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

Menurut Todaro, (2004) Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali di jumpai dalam kehidupan bersosial. kemiskinan seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi secara statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. rendahnya tingkat kehidupan yang sering dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dalam lingkaran kemiskinan. Banyak tokoh, peneliti, badan resmi pemerintah, yang memiliki pendapat tersendiri dalam memandang masalah kemiskinan ini.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Terdapat beberapa definisi dan konsep tentang kemiskinan diantaranya Todaro, (2004) mengemukakan kemiskinan absolut, yaitu sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk tersebut hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*) dalam hal ini Badan Pusat Statistik mendasarkan pada besarnya rupiah yang dikeluarkan perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori per hari dan kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang aneka barang dan jasa. Kebutuhan di bedakan dalam wilayah, yaitu wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. BPS menyebutkan ada 14 kriteria suatu keluarga atau rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa plester.
4. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung sungai atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar , arang atau minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu kali atau dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup> – buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan (2005), - atau pendapatan per kapita Rp 166.697,00 per kapita per bulan (2007)
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00, seperti sepeda motor (kredit atau non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

SMERU (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan ketika seseorang kehilangan harga diri, terbentur pada ketergantungan, terpaksa menerima perlakuan kasar dan hinaan, serta tak dipedulikan ketika sedang mencari pertolongan. SMERU membagi kemiskinan dalam sembilan dimensi, yaitu

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, atau papan)
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat

7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yangberkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, dan Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanitakorban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinaldan terpencil).

Menurut Sagjoyo dkk (2005), kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

1. Daerah pedesaan :

- a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilaitukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kgnilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kgnilai tukar beras per orang per tahun.

1. Daerah perkotaan :

- a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilaitukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kgnilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kgnilai tukar beras per orang per tahun .

Penetapan garis kemiskinan ini yang setara dengan nilai beras dimaksudkan untuk membandingkan tingkat hidup antar waktu dan perbedaan harga kebutuhan pokok antar wilayah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

## 2. Hak-hak dasar antara lain:

- a. Terpenuhinya kebutuhan pangan
- b. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan
- c. Rasa aman dari perlakuan atau aman tindak kekerasan
- d. Hak untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2004).

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan atau BKKBN adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. *World Bank* (2001) mengartikan kemiskinan sebagai keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari.

### 1.1.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

- a. Di Indonesia jumlah penduduk miskin menurut BPS Pusat di hitung sampai Bulan Maret Tahun 2014 sebanyak 28,28 juta jiwa. Faktor penyebab kemiskinan yaitu:

1. Pendidikan yang rendah. Tingkat Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang memiliki keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan Pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
  2. Malas bekerja. Sikap malas ( bersikap pasif atau berlandas pada nasib) menyebabkan seseorang mengabaikan ketidak pedulian terhadap dan tidak bergairah untuk bekerja.
  3. Keterbatasan sumber alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin.
  4. Terbatas lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawahkan konsekuensi misil bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara factual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan skill.
  5. Keterbatasan Modal. Seseorang yang miskin karena mereka tidak memiliki modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam kerangka menjelaskan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk mendapatkan penghasilan.
- b. Menurut Mudrajad (2006) secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya hanya

memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kemiskinan juga muncul akibat perbedaan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas rendah sehingga upahnya rendah. Menurut Setyawan (2001) ada beberapa sebab terjadinya kemiskinan di Negara sedang berkembang, salah satunya adalah faktor ketidak beruntungan. faktor ketidakberuntungan ini merupakan bagian dari pendekatan integrated poverty atau kemiskinan terpadu.

- c. Penyebab Kemiskinan Menurut Kuncoro (2004 ) sebagai berikut:
  1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas rendah.
  2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upayapun rendah
  3. Kemiskinan muncul di sebabkan perbedaan akses dan modal. Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu:
- d. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, Kesehatan, perumahan, pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

1. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
2. Kemiskinan Kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang di sebabakan oleh factor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Kemiskinan struktural: situasi miskin yang di sebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan social politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi menyebabkan kemiskinan.

- d. Menurut Chamsyah (2008) penyebab kemiskinan adalah berupa hubungan-hubungan kompleks antara individu yang hidup lemah dalam suatu tradisi keluarga, masyarakat, dalam ruang struktur sosial (negara) yang rumit dan menganut system modern dalam cara produksinya. Individu sebagai penyebab kemiskinan menempati posisi pertama dalam kondisi kurang kesejahteraan ini. Keluarga sebagai penyebab lain hanya insitusi social terkecil yang terlemahkan oleh struktur yang merupakan penyebab struktur kemiskinan. Penyebab-penyebab tersebut menjadi acuan kelompok maupun situasi kolektif masyarakat. Sebuah bangsa atau negara secara keseluruhan bisa pula dikategorikan miskin.



### **2.1.3 Pengangguran**

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS:2010). Pengangguran adalah seorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sadono Sukirno,1999).

#### **2.1.3.1 Jenis-jenis pengangguran**

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

##### **1. Pengangguran Alamiah**

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.

##### **2. Pengangguran Friksional**

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

##### **3. Pengangguran Struktural**

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah

Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat Fungsi tenaga kerja yang di gantikan oleh teknologi atau alat, sehingga banyak pekerja yang tidak dipekerjakan setelahnya. Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain. Persaingan dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih ekonomis sehingga membuat permintaan barang lokal menurun, industri lokal yang tidak sanggup untuk bersaing terpaksa akan bangkrut dan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Kemunduran Perkembangan Ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat di daerah lain.

#### 4. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran Konjungtur adalah Pengangguran yang di sebabkan oleh terjadinya resesi atau kemunduran di dalam kegiatan ekonomi sehingga terjadinya pengurangan dalam permintaan agregat, penurunan agregat permintaan tersebut mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar sehingga memunculkan pengangguran.

### **2.1.3.2 Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya**

#### 1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan

sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

#### 2. Pengangguran tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

#### 3. Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terjadi di masa-masa tertentu dalam satu tahun. Fenomena ini bisa terjadi pada sektor pertanian dimana petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

#### 4. Setengah Menganggur

Setengah Menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan, atau pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu.

### **2.1.3.3 Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraannya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

(Sukirno dkk 2010), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

#### **2.1.4 Upah Minimum**

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja. Dalam penetapan upah minimum dapat diperhatikan berbagai macam faktor seperti kebutuhan hidup yang layak, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, biaya hidup, kemampuan perkembangan kelangsungan perusahaan, perbandingan upah yang berlaku didaerah lain dan sebagainya.

Upah Minimum Regional merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pelaku usaha atau industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan atau pekerjaannya, upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.

Menurut Hasanuddin Rachman (2005), Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu :

1. sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot.
2. mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan.
3. meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

Sedangkan secara Makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk :

1. pemerataan pendapatan.
2. peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja.
3. perubahan struktur biaya industri sektoral.
4. peningkatan produktivitas kerja nasional dan peningkatan etos dan disiplin kerja.
5. memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.

Upah minimum dapat dibedakan menjadi Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Sektoral:

#### 1. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-O1/MEN/1999 tentang upah minimum, Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan menjadi dua yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR tk.I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II

(UMR tk.II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR tk.I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Tingkat II (UMR tk.II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM kab/kota).

## 2. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II).

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota).

Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :Per-01/Men/1999, adalah sebagai berikut : kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan,

tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-17/Men/VIII/2006 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu). Pada pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum dapat di operasionalkan.

#### **2.1.4.1 Hubungan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan**

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan Khabhibi, (2010).

Peran pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang telah lebih dahulu dilaksanakan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian baru yang sedang dilaksanakan. Tujuan dicantumkan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui kerangka teori dan keilmuan yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, agar penelitian yang dilaksanakan dapat melengkapi dan memperkaya penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Alat analisis	Kesimpulannya
1.	(I Komang Agus Adi Putra, Sudarsa Arka, 2016)	Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali	Regresi linier berganda	Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kesempatan kerja negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali
2.	Ahmad Ulil Albab Al Umar (2017)	Pengaruh PDRB, Dan UMR terhadap Tingkat Pengangguran Di Jawa Tengah	Regresi linier berganda	Inflasi dan UMKR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah
3.	Joko Susanto dan Muhamad Arsyah Wildan Pratama (2019)	Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Pertumbuhan Ekonomi, dan UMK di Yogyakarta	Regresi linier berganda	UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Yogyakarta
4	(Setiawan Deni, Hainim Kadir 2014)	Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali	Regresi linier berganda	Pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di provinsi Riau
5	Istifaiyah (2015)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur	Regresi linier berganda	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan. Ketika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka di harapkan memiliki tingkat kemiskinan yang rendah
6	Syahrina Syam HS (2013)	Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan	Analisis Linear Berganda	Secara Simultan upah dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan



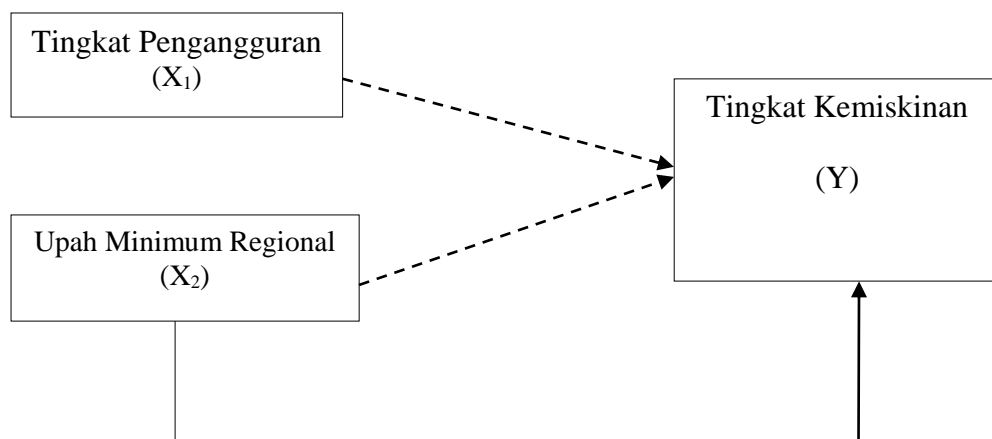
		Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makasar		signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Makasar periode tahun 2001-2011. Secara Parsial dapat diperoleh hasil sebagai Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Makasar, pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila menurunnya tingkat pengangguran di Kota Makasar
7	Ni Wayan Mentari dan Nyoman Mahendra Yasa (2006)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah terhadap tingkat pengangguran melalui jumlah investasi di Provinsi Bali.	Analisis regresi linear berganda	analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat upah dan investasi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pengangguran.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Menurut Todaro, (2004) Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali di jumpai dalam kehidupan bersosial. kemiskinan seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi secara statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Penduduk menurut Sirjanti dan A. Rahman, penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut. Pengangguran pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, semakin tinggi tingkat pengangguran maka dapat dikatakan semakin tinggi pula angka kemiskinan di suatu daerah. Upah minimum regional mencerminkan pendapatan yang diterima pekerja, adanya kenaikan tingkat

upah minimum regional akan meningkatkan pendapatan masyarakat, penetapan upah minimum regional yang pantas dan tepat diharapkan mendorong penduduk yang berada dibawah kemiskinan mampu hidup layak sehingga tingkat kemiskinan akan turun.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



Keterangan Gambar:

-----> = Parsial

————> = Simultan

#### 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Sifat sementara pada hipotesis ini berarti bahwa hipotesis dapat diubah, diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep yang digunakan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTT
2. Upah Minimum Regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTT
3. Tingkat pengangguran, dan Upah minimum regional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTT.